

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PUBLIK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Putri Puspita Sari ¹⁾, Maria ²⁾, Rosy Armaini ³⁾

Prodi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author:

putripuspitapaisol@gmail.com ¹⁾, mariamardjuki@gmail.com ²⁾, rosyarmaini@polsri.ac.id ³⁾

Abstrak

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui bukti secara empiris pengaruh akuntabilitas publik BLUD Rumah Sakit BARI Palembang. Faktor yang diamati, standar pelayanan minimal dan pemanfaatan informasi teknologi. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dan data menggunakan regresi. Populasi penelitian ini pegawai di Rumah Sakit BARI Palembang sedangkan sampel penelitian menggunakan purposive sampling yang dikhususkan pada pegawai sesuai bagian masing-masing. Responden penelitian yaitu sebanyak 30 orang. Hasil penelitian menunjukkan standar pelayanan minimal dan pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi sebesar 98,5 % terhadap akuntabilitas publik badan layanan umum daerah. Dengan adanya kajian ini diharapkan berimplikasi bagi pegawai Rumah Sakit BARI Palembang dalam melaksanakan pelayanan menuju pada tata kelola layanan publik yang baik dan bersih. Saran bagi penelitian yang akan datang agar sampel penelitian diperbanyak dengan mengamati pada perangkat-perangkat daerah lainnya. Selain itu, faktor-faktor yang berhubungan dengan upaya faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik BLUD dapat ditambahkan lagi.

Kata Kunci: Standar Pelayanan Minimal, Teknologi Informasi, Akuntabilitas Publik

Abstract

This study is intended to find empirical evidence about the influence of public accountability BLUD Palembang BARI Hospital. Factors observed, minimum service standards and utilization of information technology. This research includes quantitative research and data using regression. The research population is employees at the BARI Palembang Hospital, while the research sample uses purposive sampling which is aimed at employees according to their respective sections. The research respondents were as many as 30 people. The results showed that the minimum service standards and the utilization of information technology contributed 98,5% to the public accountability of regional public service agencies. With this study, it is hoped that it will have implications for employees of the BARI Palembang Hospital in carrying out services towards good and clean public service governance. Suggestions for future research are to increase the research sample by observing other regional instruments. In addition, the factors related to the efforts of factors affecting the public accountability of the BLUD can be added.

Keywords: Minimum Service Standards, Information Technology, Public Accountability

PENDAHULUAN

History:

Received : 25 Juni 2023

Revised : 10 Oktober 2023

Accepted: 25 Desember 2023

Published: 26 Desember 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



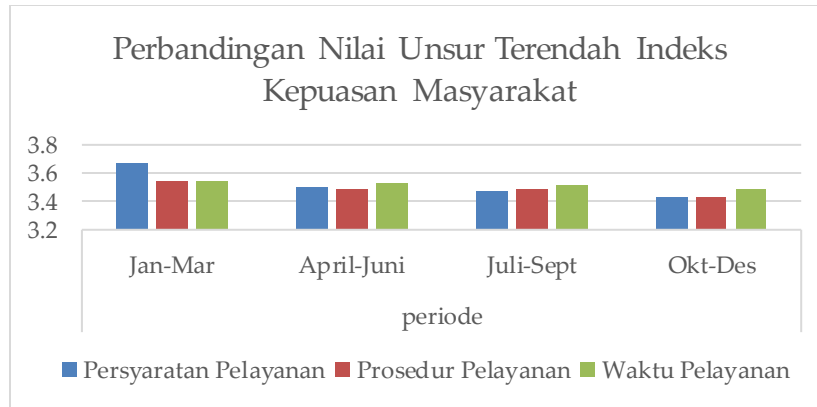
Setiap Negara mempunyai peraturan tentang cara melindungi dasar warga negaranya, seperti hak atas jaminan kesehatan, karena kesehatan Merupakan salah satu keperluan pokok yang diperlukan oleh manusia, yang harus dijamin oleh negara untuk salah satu hak asasi ini harus terpenuhi. Cara yang diterapkan masing-masing negara tentunya tidaklah sama, terdapat faktor yang mempengaruhi seperti kepentingan negara, paradigma dan sistem hukum yang berlaku (Setyowati, 2022). Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang memenuhi kriteria, lalu bisa melayani masyarakat dengan pelayanan yang berkualitas secara adil. Hal ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan negara dan juga mematuhi prinsip akuntabilitas.

Dalam usaha mencapai pengelolaan kinerja yang komprehensif, diperlukan akuntabilitas publik sebagai sarana yang memastikan organisasi tidak hanya berorientasi pada pendapatan semata, tetapi juga memberi fokus pada kepuasan pengguna layanan (customer-focus) dan mencermati setiap proses serta kepuasan pegawai. Akuntabilitas publik dalam OPD diukur dengan laporan keuangan pemerintah, sedangkan dalam rumah sakit akuntabilitas diukur dengan laporan keuangan pemerintah dan sistem pelayanan publik.

IKM dapat mengukur Kualitas kinerja dalam pelayanan publik yang optimal menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat, yang merupakan hasil dari perbandingan antara kinerja pelayanan yang diberikan dengan harapan mereka. Nilai yang tinggi dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencerminkan komitmen pihak penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam layanan publik, sehingga pemerintah dapat dengan jelas mengidentifikasi kebutuhan publik yang harus dipenuhi.

RSUD Palembang BARI adalah salah satu BLUD yang terletak pada Provinsi Sumatera Selatan. Banyaknya rujukan dan layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat pada RSUD BARI maka kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan menjadi hal yang penting dalam menilai kualitas pelayanan BLU. Berikut ini grafik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama hitungan triwulan periode tahun 2022 terhadap RSUD Palembang BARI.

Gambar 1. Grafik Perbandingan Nilai Unsur terendah Indeks Kepuasan Masyarakat



Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Rumah Sakit Palembang BARI, 2022

Berdasarkan grafik IKM diatas pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, dan Waktu Pelayanan telah mencapai nilai yang maksimal dalam target yang ditetapkan rumah sakit setiap perhitungan triwulan. Pada bulan Januari- Maret persentase capaian indeks kepuasan masyarakat Persyaratan Pelayanan mencapai 91,83% sementara Prosedur Pelayanan mencapai 88,5% sedangkan Waktu Pelayanan mencapai 88,6%. Pada bulan April- Juni persentase capaian indeks kepuasan masyarakat Persyaratan Pelayanan mencapai 87,5% sementara Prosedur Pelayanan mencapai 87,2% sedangkan Waktu Pelayanan mencapai 88,2%. Pada bulan Juli- September persentase capaian indeks kepuasan masyarakat Persyaratan Pelayanan mencapai 87% sementara Prosedur Pelayanan mencapai 87,2% sedangkan Waktu Pelayanan mencapai 88%. Pada bulan Oktober-Desember persentase capaian indeks kepuasan masyarakat Persyaratan Pelayanan mencapai 85% sementara Prosedur Pelayanan mencapai 85% sedangkan Waktu Pelayanan mencapai 87%.

Pada tahun 2022, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi berdasarkan fungsi dan tugas Rumah Sakit BARI Palembang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mempengaruhi sistem pelayanan. Permasalahan tersebut adalah:

1. Aktivitas pemberian informasi di jejaring sosial yang perlu ditingkatkan secara berkala agar lebih intensif.
2. Penggunaan layanan BARI Mobile untuk mempersingkat waktu antrian pendaftaran pasien memerlukan perhatian dan pengembangan lebih lanjut.
3. Diperlukan penambahan jumlah media informasi yang tertulis mengenai persyaratan pelayanan di setiap unit pelayanan yang relevan.

Dengan demikian, perbaikan pada aspek pemanfaatan teknologi informasi tersebut dapat meningkatkan sistem pelayanan Rumah Sakit BARI Palembang.

Penelitian ini merujuk pada Isyaturrodhiah&Evada (2020) yang menunjukkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik di RSUP Mohammad Hoesin. Namun, tidak ditemukan pengaruh signifikan dari standar pelayanan minimal terhadap akuntabilitas publik di

rumah sakit yang sama. observasi ini berbeda dengan observasi sebelumnya dalam dua aspek. Pertama, objek penelitiannya dilakukan di rumah sakit BARI Palembang. Kedua, variabel yang digunakan termasuk standar pelayanan minimal dan penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi oleh penulis. Dan penelitian ini mengacu pada (Lestari, 2022) yang mengungkapkan standar pelayanan minimal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas publik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perbedaan antara studi ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut ; penulis menyertakan unsur tambahan dalam penelitian ini yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai satu bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas publik.

A. Kebijakan dan Pelayanan Publik

Menurut (Abidin, 2016 : 19) Kebijakan adalah suatu ketentuan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga berwenang dengan tujuan mengenai penyelesaian suatu masalah atau mencapai sasaran yang diharapkan setiap pengunjung. Menurut Mulyadi (2016:45) Kebijakan publik adalah Dokumen hukum yang dihasilkan melalui proses administratif, ilmiah, dan politis yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan (policy maker) dan pemegang kebijakan terkait. Kebijakan publik ini bertujuan untuk mengatur, mengoprasikan, dan menyelesaikan masalah tertentu dalam masyarakat demi kebutuhan bersama.

Secara keseluruhan, pengertian "pelayanan publik" dapat di istilahkan sebagai aktivitas dan inisiatif tertentu yang ditujukan dalam memenuhi kebutuhan umum penduduk atau mengasih dukungan dalam meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi seluruh masyarakat. Saat ini, cakupan penyelenggaraan pelayanan publik semakin meluas dan melibatkan aspek lebih dari sekadar pemenuhan atau perlindungan hak-hak dasar manusia. Hal ini mencakup bidang seperti halnya bidang pendidikan, sandang, pangan, perumahan yang layak, lapangan kerja yang memadai, perlindungan kesehatan, serta keberlanjutan lingkungan yang sehat. , dan berbagai hal lainnya.

B. Akuntabilitas Publik

Menurut Madiasmo (2022 : 27) Akuntabilitas adalah pandangan yang lebih komprehensif mengenai *stewardship* adalah akuntabilitas publik. *Stewardship* merujuk pada pengaturan atau pengendalian dari suatu kegiatan dengan cara yang ekonomis dan efisien tanpa adanya kewajiban untuk melaporkan. Di sisi lain, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab seorang steward (pengelola) terhadap pemberi tanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan di atas, akuntabilitas publik yaitu sebuah cara pelaksana anggaran untuk memberikan suatu pertanggungjawaban kepada penduduk dan atasannya, yang menghasilkan kepuasan masyarakat terhadap manfaat yang diterima

dari pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Terdapat 2 macam akuntabilitas publik yaitu, Akuntabilitas vertikal adalah ketika unit-unit kerja (dinas) harus memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, sementara akuntabilitas horizontal adalah ketika mereka harus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara umum.

Keterkaitan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan akuntabilitas publik adalah terkait dengan akuntabilitas horizontal yang pertanggungjawabannya kepada seluruh penduduk, SPM melibati pelayanan masyarakat dan diperoleh masyarakat harus terpenuhi secara minimal, agar masyarakat puas terhadap pelayanan publik yang diberikan. Apabila SPM sudah terpenuhi akan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Keterkaitan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan akuntabilitas publik adalah, Penerapan teknologi informasi yang konvergen dalam konteks *e-Government* bisa memberikan kenyamanan dan memungkinkan penduduk agar mendapatkan informasi atau berkomunikasi secara interaktif. Pemanfaatan teknologi dapat menyederhanakan akses masyarakat terhadap informasi, mengurangi tingkat korupsi, serta menjadi salah satu metode untuk meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas publik.

C. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (2018). Pasal 1, dalam peraturan ini BLUD merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Tujuan BLUD agar meningkatkan efektivitas, efisiensi, keterjangkauan, transparansi, dan akuntabilitas untuk memberikan pelayanan publik. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kelayakan, dan manfaat, Sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang baik. Tujuan utama BLUD adalah mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah yang menjalankan manajemen berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh kepala daerah. Kepala daerah memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum, sementara pejabat yang mengelola BLUD memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pemberian layanan umum, terutama dalam konteks menghasilkan manfaat. BLUD dianggap sebagai bagian integral yang tak terpisahkan dari pemerintah daerah.

Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD BLUD adalah bagian dari Dinas Kesehatan yang menawarkan layanan kesehatan yang berkualitas dan memiliki kemandirian dalam manajemen keuangan, aset daerah, dan urusan pegawai. Tugas utama dari BLUD RSUD adalah menyediakan layanan kesehatan komprehensif yang mencakup perawatan inap, perawatan ambulans, dan perawatan gawat darurat kepada individu.

D. Standar Pelayanan Minimal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Menurut (Kemenkes RI, 2016) Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan adalah peraturan yang mengatur jenis dan tingkat kualitas pelayanan dasar yang harus tersedia untuk setiap warga negara sebagai hak dasar. Setiap warga negara, sesuai dengan kodratnya, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan kemampuan manusiawi yang dimilikinya

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Pelayanan dasar disini merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

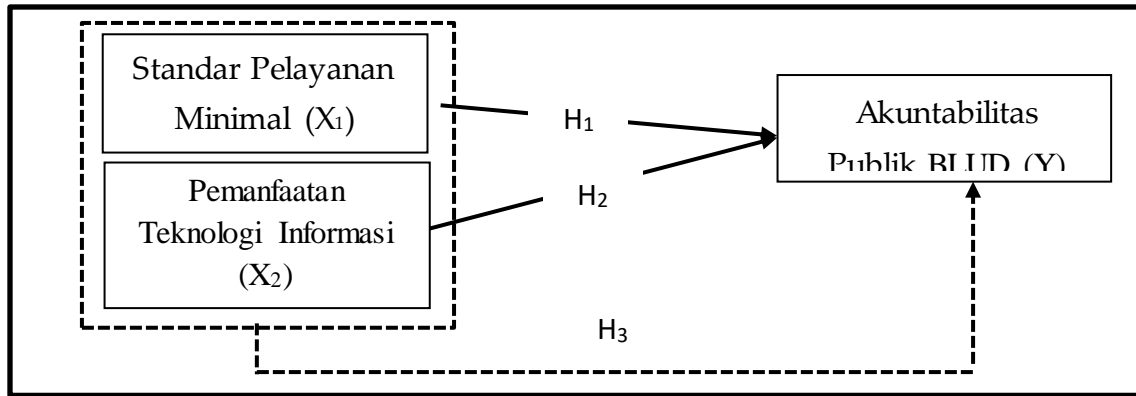
Dalam konteks standar pelayanan minimal, istilah "minimal" mengacu pada tingkat pelayanan yang dianggap sebagai persyaratan minimum dari perspektif masyarakat, namun memiliki makna "optimal" ketika dilihat dari perspektif pemerintah daerah. Istilah lain, standar pelayanan minimal adalah frasa yang digunakan oleh masyarakat yang menerima layanan untuk menjelaskan standar kualitas dan jumlah yang diharapkan dari pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik.

E. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Nahariah & Armita (2022) Teknologi informasi adalah alat berupa perangkat keras atau perangkat lunak untuk membantu meningkatkan mutu informasi yang diberikan kepada penduduk adalah suatu hal penting. Penggunaan teknologi informasi dalam sektor kesehatan, khususnya di Rumah Sakit, memiliki peran utama dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Menurut Armairi (2017) Tidak hanya itu, penting juga untuk membangun sistem pengendalian internal yang memenuhi guna memberikan kepercayaan yang memadai tentang pencapaian tujuan organisasi lewat aktivitas yang efisiensi dan efektivitas, keakuratan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta perlindungan aset negara.

Berdasarkan teori yang dijelaskan diatas, berikut kerangka pemikiran penelitian ini.



Sumber: Penulis, 2023

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih yaitu penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:15) Penelitian kuantitatif adalah sebuah pendekatan yang mengacu pada paradigma positivisme. Metode ini dipergunakan dalam menginvestigasi populasi atau sampel terpilih dengan mengumpulkan data lewat instrumen penelitian, kemudian menganalisis secara kuantitatif atau statistik. Tujuan utamanya yaitu menggambarkan dan menguji hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya.

Data yang dipergunakan yaitu data primer, adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018:213). Dalam observasi ini, data primer didapat dari tanggapan responden terhadap kuesioner yang telah disebar.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam observasi ini, dibutuhkan data yang tepat dan akurat. Penulis memilih melakukan penelitian di Rumah Sakit Palembang BARI, sebuah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terletak di Jl. Panca Usaha No.1, Kel 5 Ulu, Kec Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dilakukan pada tahun 2023.

B. Populasi

Menurut Sugiyono (2018:130) populasi yaitu Wilayah generalisasi dalam penelitian ini mencakup subyek atau obyek yang memiliki Ciri-ciri dan atribut khusus yang disahkan oleh peneliti agar diselidiki lalu ditarik kesimpulannya. menurut pengertian ini maka populasi pada observasi sesuai dengan tupoksi beberapa bidang dan bagian pada Rumah Sakit Palembang BARI terkait variabel penelitian Standar Pelayanan Minimal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik Badan Layanan Umum Daerah. Terdapat 30 reponden dalam populasi penelitian ini, yaitu dalam bidang humas dan admisi.

C. Sampel

“Sampel adalah sub dari populasi yang mempunyai jumlah dan karakteristik ” (Sugiyono, 2018:131). Jika jumlah populasi banyak dan tidak memungkinkan untuk diteliti semua, maka dari itu, peneliti dapat memilih sampel dari populasi tersebut.

Non probability sampling adalah sampel yang digunakan dalam observasi. Dikarenakan tidak semua populasi terlibat dalam observasi. Teknik *sampling jenuh* yang digunakan penulis. Menurut (Sugiyono, 2018:138) Sampling jenuh atau sensus yaitu suatucara menentukan sampel diman seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Biasanya cukup relatif kecil populasi yang digunakan dalam metode ini, kurang lebih 30 orang, atau dalam observasi ingin mencapai generalisasi dengan tingkat kesalahan sangat rendah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengandalkan data primer yang didapat dari 2 cara, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka menggunakan literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian sebelumnya. Sementara itu, penelitian lapangan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.

Kuesioner disampaikan secara langsung kepada responden, sehingga peneliti dapat berinteraksi langsung dengan mereka dan memperoleh informasi tambahan terkait penelitian jika diperlukan. Selain itu, dengan metode ini, peneliti dapat mengurangi kemungkinan kuesioner diisi oleh orang yang tidak relevan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data dari responden dan sumber data lain terkumpul, langkah berikutnya dalam penelitian kuantitatif adalah melakukan analisis data. (Sugiyono, 2018:226). Dalam proses analisis data, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan, seperti menggabungkan data sesuai variabel dan jenis responden, melakukan tabulasi data dari seluruh responden berdasarkan variabel yang diteliti, serta menyajikan data untuk setiap variabel yang relevan. Selain itu, diperlukan perhitungan penggunaan statistik dalam menanggapi perumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dikemukakan dalam penelitian.

Menurut Sugiyono (2022) Dalam observasi ini, digunakan dua jenis statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang sudah didapat tidak bermaksud menyimpulkan yang berlaku secara umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2018). Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menghitung standar deviasi, rata-rata (*mean*), nilai maksimal, nilai minimal, serta jumlah data penelitian. Dalam penelitian ini, alat bantu yang digunakan adalah SPSS IBM 26. Sebelum melakukan analisis, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas data agar penelitian dapat dilanjutkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Variabel dalam penelitian ini meliputi standar pelayanan minimal (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi (X2) sebagai variabel independen (variabel bebas), serta akuntabilitas publik (Y) sebagai variabel dependen (variabel terikat). Responden dalam penelitian ini merupakan pegawai bidang humas dan admisi yang bekerja di Rumah Sakit Palembang BARI. Pengumpulan kuesioner dilakukan dalam rentang waktu dari bulan Mei 2023 hingga Juli 2023, dan berhasil mengumpulkan kembali 30 kuesioner dari responden.

Berikut adalah Tabel 1 yang menunjukkan hasil analisis menggunakan regresi linier berganda.

Tabel 1. Uji Statistik T

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1,620	1,060		1,528	,138
	X1	,892	,062	,710	14,375	,000
	X2	,595	,095	,307	6,227	,000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh nilai t hitung sebesar 14,375. Untuk mencari nilai t tabel, dilakukan uji 2 sisi pada tingkat signifikansi $0.05/2 = 0.025$ dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $30-2-1 = 27$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasilnya, t tabel diperoleh sebagai 2,052/-2,052. Karena nilai t-hitung (14,375) lebih besar dari t-tabel (2,052), maka H_0 (hipotesis alternatif) diterima. Selain itu, signifikansi pada uji t juga kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga nilai t hitung sebesar 14,375 dengan signifikansi 0,000. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Standar Pelayanan Minimal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik. Begitu pula, Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik.

Tabel 2. Uji Statistik F

ANOVA^a

Putri Puspita Sari ¹⁾, Maria ²⁾, et al., **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Publik Badan Layanan Umum Daerah**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3729,066	2	1864,533	951,628	,000 ^b
	Residual	52,901	27	1,959		
	Total	3781,967	29			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti Menggunakan SPSS)

Dari Tabel 2, nilai F_{hitung} diperoleh sebesar 951,628 dengan signifikansi sejumlah 0,000. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai F_{hitung} (951,628) lebih besar dari nilai F_{tabel} (3,35). Oleh karena itu, secara bersama-sama, variabel independen Standar Pelayanan Minimal (X1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik.

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,993 ^a	,986	,985	1,399753

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti Menggunakan SPSS)

Berdasarkan hasil uji determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,986. Artinya, variabel Standar Pelayanan Minimal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi memberikan pengaruh sebesar 98,6% terhadap variabel Akuntabilitas Publik. Sementara itu, sisanya sebesar 1,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini dan tidak disebutkan.

B. Pembahasan

a) Pengaruh Standar Pelayanan Minimal terhadap Akuntabilitas Publik

Hasil pengujian menunjukkan variabel SPM mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik Rumah Sakit Palembang BARI. Dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan karena variabel standar pelayanan

minimal (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 14,375 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,052 dengan nilai probabilitas 0,000 berarti lebih kecil dari 0,05, maka dapat ditemukan bahwa standar pelayanan minimal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Rumah Sakit Palembang BARI. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima. Dapat diketahui kondisi standar pelayanan minimal Rumah Sakit Palembang BARI mempengaruhi akuntabilitas publik di Rumah Sakit Palembang BARI.

b) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Publik

Hasil pengujian menyatakan variabel teknologi informasi (X_2) nilai t_{hitung} sejumlah 6,227 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,052 dengan nilai probabilitas 0,000 berarti lebih kecil dari 0,05 yang artinya teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Rumah Sakit Palembang BARI. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima. Teknologi informasi yang terus ditingkatkan dengan adanya penggunaan nyata teknologi informasi di lingkungan Rumah Sakit Palembang BARI akan meningkatkan akuntabilitas publik di Rumah Sakit Palembang BARI.

c) Pengaruh Standar Pelayanan Minimal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Publik

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu standar pelayanan minimal (X_1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) secara bersama sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik Rumah Sakit Palembang BARI. Dapat dikatakan bahwa hal itu memiliki dampak atau pengaruh. positif signifikan karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($951,628 > 3,35$) dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 atau 5%, lalu dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen yaitu standar pelayanan minimal dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas publik Rumah Sakit Palembang BARI. Adanya peningkatan standar pelayanan minimal dan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal akan meningkatkan akuntabilitas publik Rumah Sakit Palembang BARI.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji yang terungkap, Secara parsial variabel standar pelayanan minimal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, yang ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} sebesar 14,375 yang lebih besar daripada nilai t_{tabel} sebesar 2,052 dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Artinya, semakin baik standar pelayanan minimal, maka semakin baik pula akuntabilitas publik. Demikian pula, variabel pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, dengan t_{hitung} sebesar 6,227 yang melebihi t_{tabel} (2,052), dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa semakin efektif pemanfaatan teknologi informasi

dalam menjalankan kegiatan instansi, maka akan semakin meningkatkan tingkat akuntabilitas publik.

Selanjutnya, secara simultan, kedua variabel independen (standar pelayanan minimal dan pemanfaatan teknologi informasi) memiliki pengaruh yang bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (akuntabilitas publik). Temuan ini membuktikan bahwa kedua variabel independen mempunyai keterkaitan untuk saling memperkuat dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Semakin optimal standar pelayanan minimal dan pemanfaatan teknologi informasi, maka akan semakin meningkatkan tingkat akuntabilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan Publik* (M. M. dan D. Mandasasi (ed.); 3rd ed.). Salemba Humanika.
- Armaini, R. (2017). Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, VI(2), 71–86.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, (2018).
- Mardiasmo. (2022). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.); 1st ed.). CV ANDI OFFSET.
- Nahariah, & Armita, D. (2022). Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19. *Qiyam, Jurnal Al*.
- Setyowati, R. K. (2022). Sistem Jaminan Kesehatan yang Memenuhi Hak-Hak Kepesertaan. *Justice Voice*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.27>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (29th ed.). CV ALFABETA.